

MEMBACA BUDAYA POLITIK INDONESIA DENGAN KOMUNIKASI BERASA

¹Afiati Fatimah

²Wahyuni Choiriyati

¹*SDIT Muhammadiyah PAKEM, apietafiati@yahoo.com*

²*Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma E-mail: choiri@staffsite.gunadarma.ac.id*

¹, Jalan Kaliurang, Km. 17.5 Tegalsari, Pakem, Sleman – Yogyakarta

²Jalan Margonda Raya No. 100 Depok - Jawa Barat 16424

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan menelaah sistem demokrasi yang sesuai bagi proses komunikasi politik (*political communication*) di Indonesia, yang dapat dipahami sekaligus dibaca menurut berbagai cara. Ketika membaca komunikasi politik di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dengan situasi sejarah sistem politik Indonesia sendiri. Mulai dari masa proklamasi hingga sekarang. Dalam kajian artikel ini, penulis ingin menyampaikan Model “Komunikasi Berasa” atau lebih dikenal dengan *Experientially Meaningful Communication*, sebuah pendekatan dalam membaca dan memahami proses komunikasi politik di Indonesia melalui sinergi penyampaian dan pembuktian pesan melalui pengalaman khalayak terhadap makna pesan yang disampaikan oleh agen, retor atau aktor komunikasi politik. Manakala publik sudah pada titik desintisasi atau tumpul dan tidak peka terhadap pesan politik, maka melalui teknik komunikasi berasa publik diajarkan untuk memaknai keberadaan sebuah pesan politik dari berbagai dimensi sensorik komunikasi. Diharapkan publik tidak lagi apatis terhadap kondisi politik, apolitik atau bersikap golongan putih (*golput*) terhadap keputusan politik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sensor keberadaan yang hendaknya dikembangkan pada publik meliputi: keberadaan inderawi, keberadaan emosional, keberadaan rasional, keberadaan relevansional, keberadaan benefisial dan keberadaan sosial.

Kata Kunci: Budaya Politik; Komunikasi Politik; Komunikasi Berasa; Publik

ABSTRACT

*This paper aims to examine a democratic system that is suitable for the political communication process in Indonesia, which can be understood at the same time read in various ways. When reading political communication in Indonesia, it cannot be separated from the historical situation of the Indonesian political system itself. Starting from the proclamation until now. In the study of this article, the author wants to convey the Model "Tasteful Communication" or better known as *Experientially Meaningful Communication*, an approach in reading and understanding the process of political communication in Indonesia through the synergy of delivering and proving messages through audience experience on the meaning of the message conveyed by the agent, rhetor or political communication actors. When the public is at the point of destination or blunt and insensitive to political messages, then through public-style communication techniques are taught to interpret the meaning of a political message from various sensory dimensions of communication. It is hoped that the public will no longer be apathetic about political conditions, apolitics or white groups (*abstain*) against political decisions. As for the factors that influence sense sensors that should be developed in the public include: sensory sense, emotional feeling, rational sense, sense of relevance, beneficiary sense and social sense.*

Keywords: Political Culture; Political Communication; Feeling Communication; Public

PENDAHULUAN

Salah satu tantangan dalam dinamika komunikasi politik di Indonesia adalah menelaah sistem demokrasi yang sesuai bagi proses komunikasi politik (*political communication*) di Indonesia, yang dapat dipahami sekaligus dibaca menurut berbagai cara. McQuail (1992:427-437), mengatakan bahwa komunikasi politik merupakan “*all processes of information (including facts, opinions, beliefs, etc.) transmission, exchange and search engaged in by participants in the course of institutionalized political activities*”. Pernyataan McQuail ini dapat diartikan bahwa semua proses penyampaian informasi termasuk fakta, pendapat-pendapat, keyakinan-keyakinan, pertukaran dan pencarian tentang semua hal yang dilakukan oleh para partisipan dalam konteks kegiatan politik yang bersifat melembaga. Adapun tajuk membaca budaya politik dalam penulisan kajian ini dimaksudkan sebagai memahami budaya politik sebagai salah satu komponen terpenting dalam suatu sistem politik. Budaya politik menunjukkan ciri khas dari perilaku politik yang ditampilkan oleh individu yang terintegrasi dalam beberapa kelompok masyarakat ataupun suku bangsa. Oleh karena itu budaya politik yang dimilikinya pun berbeda-beda.

Pendapat demikian menyiratkan beberapa hal penting, diantaranya bahwa komunikasi politik menandai keberadaan dan aktualisasi lembaga-lembaga politik dan komunikasi politik merupakan fungsi dari sistem politik, dimana komunikasi politik berlangsung dalam suatu sistem politik tertentu. Sejalan dengan pemikiran McQuail, Robert Meadow (1980) dalam *Politics As Communication* menegaskan bahwa istilah komunikasi politik merujuk pada “*any exchange of symbols or messages that to significant extent have been shaped by, or have consequences for the functioning of political systems*” (segala bentuk pertukaran simbol atau pesan yang sampai tingkat tertentu dipengaruhi atau mempengaruhi berfungsinya sistem politik).

Definisi terhadap pemikiran Meadow ini sekaligus memberikan penekanan pada relasi timbal balik antara komunikasi dengan sistem politik. Komunikasi dipengaruhi dan mempengaruhi sistem politik. Lebih jauh Meadow menguraikan sistem politik sebagai “*system whose components interact with respect to power and authoritative resource allocation for the purpose of making decisions*”, dimana sistem-sistem yang memiliki komponen-komponen yang saling berinteraksi satu dengan yang lain terkait dengan kekuasaan dan kewenangan penjatahan sumber daya untuk pengambilan-pengambilan keputusan.

Pemikiran diatas memberikan penegasan bahwa dalam proses komunikasi politik sangat dipengaruhi oleh sistem politik. Hal tersebut terlihat jelas dengan berbagai peraturan yang mengatur jalur informasi publik. Misalnya pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-undang No.23 tahun 2003 mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang menyatakan bahwa

media cetak dan media elektronik memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pasangan. Ironinya, media tanah air hari ini justru merupakan media yang semua pemiliknya mencalonkan diri sebagai pemimpin negeri ini. Inilah era media megaphone yang sekedar mengeraskan kepentingan para pemilik yang ingin berkuasa.

Aspek komunikasi yang juga berpengaruh pada tataran sistem politik kita dapat pula diamati melalui berbagai bentuk. Misalnya, aksi protes dan demonstrasi masyarakat luas yang kemudian memperoleh amplifikasi yang kuat dari media massa. Situasi tersebut memaksa pemerintah atau penguasa untuk mengubah atau mencabut suatu kebijakan, memaksa pejabat turun, bahkan mengakibatkan perubahan politik yang radikal, termasuk menumbangkan rezim berkuasa. Ilustrasi diatas menunjukkan bahwa komunikasi dapat dikatakan sebagai komunikasi politik tergantung pada karakter pesan dan dampaknya terhadap sistem politik. Artinya semakin jelas pesan komunikasi berkaitan dengan politik dan semakin kuat dampaknya terhadap sistem politik.

Oleh karena itu, ketika membaca komunikasi politik di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dengan situasi sejarah sistem politik Indonesia sendiri. Mulai dari masa proklamasi hingga sekarang. Dalam kajian artikel ini, penulis ingin menyampaikan Model “Komunikasi Berasa” atau lebih dikenal dengan *Experientially Meaningful Communication*, sebuah pendekatan dalam membaca dan memahami proses komunikasi politik di Indonesia melalui sinergi penyampaian dan pembuktian pesan melalui pengalaman khalayak terhadap makna pesan yang disampaikan oleh agen, retor atau aktor komunikasi politik. Diharapkan model ini sebagai solusi bagi publik untuk membaca budaya politik kita dengan lebih arif, bijak dan santun.

Sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi. Hal ini menjadi keharusan bagi suatu negara yang menginginkan pengakuan eksistensi dari negara lain. Salah satunya adalah mencantumkan prinsip-prinsip demokrasi dalam Undang-Undang Dasar negaranya, sekalipun dalam praktiknya sering kali demokrasi tidak sejalan dengan kondisi riil di negara tersebut. Mengutip pada pemikiran Cangara (2009), yang menguraikan bahwa bagi Indonesia, sejak dwitunggal Soekarno-Hatta memproklamasikan sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949, Indonesia telah menganut sistem pemerintahan yang berfluktuasi antara demokrasi presidensial dan demokrasi parlementer. Bahkan pada awal berdirinya, pemerintah kolonial Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia, mencap bahwa Indonesia sebagai negara yang tidak menganut prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini nampak dalam pernyataan Presiden Soekarno dan Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) bahwa dalam masa peralihan sebelum ada DPR, maka kekuasaan berada di tangan presiden. Namun hal ini terbantahkan dengan keluarnya maklumat

wakil Presiden No. X tahun 1945 yang menyatakan bahwa sebelum terbentuknya DPR, kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh KNIP.

Periode 1950 sampai Juli 1959, merupakan masa pemerintahan di mana sistem politik Indonesia menganut demokrasi liberal, namun oleh Nugroho Notosusanto disebutkan bahwa demokrasi liberal sudah dimulai ketika Undang-Undang Dasar RIS 27 Desember 1949.

Pemberlakuan UUD Sementara dan pengakuan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki agenda pokok, yakni melaksanakan Pemilihan Umum pada 1953. Namun dalam kenyataannya baru bisa dilaksanakan pada tahun 1955 ditengah maraknya pemberontakan dan gangguan keamanan di berbagai daerah. Melihat sejarah Pemilu 1955, yang diikuti 37.785.299 penduduk Indonesia dengan 28 partai politik, menghasilkan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai pemenang dengan 8.434.653 suara, dengan perolehan kursi sebanyak 57 kursi. Disusul Masyumi sebanyak 7.903.886 suara, dengan kursi sebanyak 57. NU meraih 6.955.141 suara, dengan jumlah kursi 45, disusul PKI yang meraih 6.176.914 suara, dengan jumlah 39 kursi. Selebihnya adalah partai-partai yang hanya memperoleh suara satu juta ke bawah (Cangara, 2009). Melihat proporsi kemenangan partai diatas, tidaklah mengherankan terjadi persaingan ketat antara kelompok nasionalis, komunis dan kelompok agamis. Oleh sebab itu sejak dilantik oleh presiden Sukarno pada 10 November 1956, konstituante dalam sidang-sidangnya belum bisa menghasilkan rumusan UUD dikarenakan konflik antar kelompok dalam merumuskan kesepakatan. Setiap kelompok saling berhadapan mengusulkan Islam dan Pancasila sebagai dasar negara.

Ketika suhu politik tidak stabil, perdebatan dalam konstituante terus memanas tanpa menghasilkan rumusan apapun. Bahkan kabinet yang dibentuk silih berganti jatuh bangun, bahkan tercatat tujuh kali terjadi pergantian kabinet dalam kurun waktu 1950-1959. Krisis politik yang mengakibatkan jatuh banggunya kabinet, menimbulkan rasa tidak puas di kalangan pemerintah Indonesia. Dalam kondisi pemerintahan yang kacau, pemberontakan meletus di berbagai wilayah mulai dari DI/TII di Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Selatan hingga Sulawesi Selatan. Bahkan di Sumatera bagian tengah dan Sulawesi Utara muncul ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah atas pembangunan di daerah. Situasi negara yang terancam secara teritorial dan ideologi, memaksa Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959. Dekrit ini menyatakan: (1) pembubaran konstituante; (2) berlakunya kembali UUD 1945, (3) pembentukan MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Meski cukup menuai kritik, namun Dekrit 5 Juli 1959 ini dapat menjadi titik tolak demokrasi baru yang dikenal dengan demokrasi terpimpin. Selama dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan, terjadi pelanggaran inkonstitusional yang dilakukan Presiden Soekarno dengan membentuk MPRS yang memberikan mandat presiden seumur hidup, hal ini sangat bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam situasi tersebut PKI sebagai partai berideologi Komunis memainkan peran mengadu domba kekuatan militer, yang diketahui memiliki sifat rivalitas dan *corps de esprit* antar kesatuan yang ada. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (Gestapu), justru mendudukan Mayjend Soeharto sebagai pimpinan tertinggi yang berkuasa. Hingga saat ini, situasi tersebut seringkali menjadi bahan perdebatan antara pengamat militer, pengamat politik dan para pelaku sejarah yang melihat naiknya Soeharto sebagai Presiden RI setelah jatuhnya Orde lama. Setelah bangsa ini berkelindan dengan sejarah dan budaya demokrasi yang banyak dipengaruhi oleh sistem politik yang ada, orde lama, orde baru hingga reformasi lalu muncul sebuah pertanyaan yang mencoba menggali dan membongkar dengan logika komunikasi politik. Bagaimana membaca Budaya Politik di Indonesia hari ini, Demokrasi Liberal atautkah Demokrasi Pancasila? Telaah atas pertanyaan penelitian coba dikaji dan dibaca dengan perspektif komunikasi politik dengan teori yang dapat melihat *Historical Situatedness* mengapa bangsa ini berada pada titik persimpangan budaya demokrasi yang abu abu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu kebutuhan (Bodgan dan Taylor dalam Moleong, 2006). Sementara fenomenologi sesungguhnya adalah sebuah pendekatan yang diharapkan mampu mengungkapkan sedetail mungkin objek yang dikaji dan aspek-aspek lain yang tidak mungkin dihitung dengan matematika. Dalam studi ini, adalah penting untuk menyerap dan mengungkapkan kembali perasaan dan pemikiran di balik tindakan (Mulyana, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Indonesia mesti dilihat dalam suatu kenyataan geografis yang unik, sebuah kepulauan dengan 13.500 pulau di mana 6.000 di antaranya berpenduduk, serta konteks sosial, budaya, ekonomi dan politik yang spesifik. Hal ini masih diwarnai dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta dengan penambahan kira-kira 3,5 juta setiap tahun dan rata-rata tingkat pendidikan yang rendah sampai menengah. Selanjutnya yang juga amat menentukan adalah kenyataan keragaman masyarakatnya, yang terdiri lebih dari 300 etnik dengan masing-masing bahasa dan budaya lokalnya. Dalam hal pendapatan, walaupun telah ada peningkatan kesejahteraan pada semua kelompok penghasilan, termasuk yang paling bawah, terbukti jutaan orang Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, sementara sekelompok kecil hidup amat berlebihan. Mereka termasuk para oligark yang menikmati rempah rempah melalui

kucuran proyek-proyek pemerintah dan tidak tersentuh oleh penegakan hukum selama orde baru.

Dua pertiga populasi hidup di Jawa dan Bali yang bersama-sama merupakan tujuh persen dari total luas Indonesia. Dimana pusat negara sejak penjajahan Belanda hingga saat ini masih tetap di Jawa. Situasi inilah yang mempengaruhi budaya, sistem politik sekaligus arah demokrasi di Indonesia. Kekurangan dan kelebihan berbagai sumber daya yang menyertai bangsa ini, sejak akhir tahun 1960, menggiatkan pemerintah dalam proses pembangunan. Rezim Orde Baru yang mampu berkuasa selama 32 tahun tidak henti-hentinya di awal tahun 60-an mempropagandakan kepada masyarakat bahwa mereka terikat sebagai suatu bangsa. Berdasarkan motto nasional *Bhinneka Tunggal Ika*. Dasar dari kebijakan pembangunan kesatuan ini adalah dasar negara Pancasila. Ideologi negara ini dianggap dapat diaplikasikan untuk semua aspek kehidupan sosial; bahkan semua organisasi mesti menerima ideologi negara ini sebagai satu-satunya prinsip yang membimbing. Merujuk pada pemikiran McDaniel (1994) hal yang sama juga berlaku untuk penyiaran televisi, bahkan semua program harus diseleksi (disaring) berdasarkan ideologi ini. Berdasarkan catatan sejarah, upaya pemerintah ini menimbulkan persoalan karena sesungguhnya kelompok-kelompok etnik tidak sepenuhnya memiliki niat untuk menyaksikan budaya dan kebiasaan lokal mereka menjadi inferior terhadap ideologi yang begitu luas.

Konteks Politik: Praktek Demokrasi Pancasila

Pembahasan seputar komunikasi politik, senantiasa berpijak pada perjuangan penegakan demokrasi, salah satu kunci dalam upaya membaca sistem demokrasi kita dari masa ke masa. Tautan sejarah di atas tidak bisa dihilangkan dari wajah demokrasi kita hari ini. Kontruksi demokrasi kita bergerak merekam setiap perjalanan sistem politik untuk mencetuskan, membangun bahkan membongkar secara silih berganti dari setiap rezim penguasa. Indonesia tidak dapat melihat perjalanannya berdasarkan tradisi demokrasi seperti di barat, sesudah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari Belanda pada tahun 1945, sebuah perjuangan pahit dimulai sampai Indonesia bisa memaksa pengakuan kemerdekaan dari Belanda pada tahun 1949. Pada tahun 1950 sebuah demokrasi parlementer disusun, yang kemudian untuk pertama kalinya mendorong lahirnya begitu banyak partai-partai politik kecil yang tidak mampu menciptakan kondisi stabil (Ricklefs, 1981).

Bergulirnya orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto, bertujuan meningkatkan perekonomian restorasi keteraturan dan ketenangan. Sejak tahun 1971, pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun. Melalui instruksi presiden inilah, partai-partai politik yang ada kemudia dikelompokkan dalam tiga partai utama : Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, serta Golongan Karya. Partai terakhir inilah basis kekuatan politik

Soeharto. Karakteristik rezim Soeharto, digambarkan sebagai kekuatan yang mendominasi negara dalam tatanan serta proses-proses politik, atau kedudukan negara yang relatif otonom dari kekuatan-kekuatan politik di masyarakat. Selain itu kekuasaannya relatif terpusat di tangan presiden.

Konteks Politik: Desakan Reformasi

Lahirnya gerakan reformasi di Indonesia muncul akibat dua faktor, yaitu sisi eksternal akibat tuntutan globalisasi dan sisi internal. Tentang faktor eksternal, tuntutan globalisasi menyebabkan sebuah negara perlu melakukan berbagai perubahan. Kebijakan liberalisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto sejak pertengahan 80-an dengan menundang pemodal asing menyebabkan kebutuhan akan perubahan. Pemerintah orde baru dituntut untuk menyesuaikan bernagai kebijakan yang tidak sesuai dengan sistem global atau yang mengganggu kepentingan asing. Bahkan permintaan akan perubahan bisa menyangkut aspek yang fundamental. Seperti sistem pendidikan dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia, program penanggulangan kemiskinan terhadap kelompok yang rentan terkena imbas global, sistem hukum dan peradilan.

Sementara faktor domestik, dipicu tuntutan perubahan akibat akumulasi pengetahuan dan informasi yang menyadarkan dan menciptakan pemahaman dalam masyarakat bahwa suatu peraturan perlu diubah atau dihilangkan. Ironisnya pada akhir pemerintahan Soeharto, pemerintah dianggap gagal merespons kebutuhan akan perubahan tersebut secara konstruktif pada waktu yang tepat hingga krisis memaksa terjadinya penggulingan rezim berkuasa di bawah kendali Presiden Soeharto. Kebutuhan reformasi sejatinya didahului oleh krisis ekonomi yang menyebabkan kemunduran dalam kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Faktor pemicu inilah yang menyatukan rakyat dengan kelompok aktifis reformis, mahasiswa dan kelompok intelektual bahkan kelompok marginal. Kondisi ini di amplifikasi oleh peranan media massa yang menyiarkan pemberitaan yang semakin kritis terhadap pemerintah dan oleh media TV maupun radio di tanah air yang terus menerus menyajikan debat publik mengenai kesalahan dan kelemahan kebijakan publik yang ada saat itu.

Era reformasi, menghadirkan pemimpin yang silih berganti, hingga setiap pergantian kepemimpinan selalu ditemukan kepentingan asing yang mempengaruhi sendi perekonomian nasional. Dalam terminologi ekonomi politik, bangsa ini telah dicengkeram kekuatan kapitalis yang sulit dilepaskan dari ketergantungan perekonomian kita terhadap pemodal asing dan asing. Bahkan pemerintahan yang baru bekerja setahun, justru telah menggadaikan kekuatan ekonomi pada pemodal asing dari negeri Tiongkok. Akhir tahun 2014 hingga awal tahun 2015, Indonesia dipaksa menulis catatan terburuknya dalam sejarah perekonomian. Nilai tukar rupiah terhitung paling anjlok sejak 28 tahun terakhir. Kondisi terparah, Indonesia harus mengalami kontraksi

ekonomi terburuk sepanjang sejarah, setelah krisis ekonomi terjadi di pertengahan tahun 1980. Di sela-sela situasi ekonomi Indonesia hari ini yang semakin terpuruk, berbagai diskusi menarik muncul dengan sebuah hipotesis “Dalam kondisi krisis ekonomi sekarang, dan kondisi politik yang tidak kondusif, apakah tekanan untuk perubahan politik akan sekuat yang terjadi dalam tahun 1997-1998? Jawaban atas hipotesis ini tentu memerlukan pembahasan yang kontra faktual atas fenomena sosial politik dan budaya demokrasi serta kebebasan media di tanah air dalam merespon kemauan rakyat.

Konteks Politik: Praktek Demokrasi Liberal (Kontemporer)

Istilah Demokrasi Liberal, sudah menjadi pengalaman sejarah bagi bangsa kita, ketika kurun waktu 1950-1959 sering kali terjadi pergantian kabinet yang menyebabkan instabilitas politik. Parlemen mudah mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap kabinet sehingga koalisi partai yang ada di kabinet menarik diri dan kabinet pun jatuh. Sementara Sukarno selaku Presiden tidak memiliki kekuasaan secara riil kecuali menunjuk para formatur untuk membentuk kabinet-kabinet baru, suatu tugas yang sering kali melibatkan negosiasi-negosiasi yang rumit. Kabinet Koalisi yang diharapkan dapat memperkuat posisi kabinet dan dapat didukung penuh oleh partai-partai di parlemen ternyata tidak mengurangi panasnya persaingan perebutan kekuasaan antar elite politik. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945.

Tafsir Demokrasi liberal semasa orde lama ini, sedikit berbeda dengan pendekatan Francis Fukuyama (1999) dalam tulisan karyanya yang bertajuk “*The End of History and The Last Man*”, Fukuyama hendak mengatakan bahwa paska perang dingin, tidak akan ada lagi pertarungan antar ideologi besar, karena sejarah telah berakhir dengan kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal. Bila kita telisik pemikiran mengenai demokrasi dan liberalisme versi Fukuyama, maka Liberalisme dan demokrasi sebenarnya merupakan konsep-konsep yang berbeda meskipun antara keduanya ada keterkaitan yang erat. Liberalisme politik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu aturan hukum yang mengakui hak-hak tertentu individu atau kebebasan dari kontrol pemerintah. Sedangkan demokrasi, sebagai mana dalam definisi Lord Bryce menyebutkan setidaknya tiga elemen mendasar dalam demokrasi, yaitu: hak-hak sipil dan hak-hak politik. Dengan demikian, untuk menilai Negara manakah yang layak disebut demokratis, yaitu ketika Negara memberikan kepada rakyatnya hak untuk memilih pemerintah sendiri melalui pemelihan secara periodik, bebas, dan rahasia, menggunakan sistem multi partai, atas dasar hak pilih orang dewasa yang sederajat (Fukuyama, 1999).

Istilah penggunaan multi partai pernah dilakukan Indonesia di masa orde lama 1945-1959 yang menuai disintegrasi karena banyaknya friksi dan kepentingan antar golongan dalam tubuh partai tersebut. Terdapat pula pemikiran lain dari paham Liberal, antara lain Karl R. Popper, Ludwig Von Mises, John Locke, Adam Smith, David Hume. Dalam berbagai tesis dan pendapatnya mereka banyak berbicara mengenai catatan keberhasilan liberalisme, pasar bebas, hak individu, toleransi, kepentingan, keadilan dan lain sebagainya yang kemudian menjadikan Liberalisme memiliki argumentasi tersendiri dalam menjawab kritisasi dari para penentangannya yang biasanya datang dari golongan atau pemikir sosialis ataupun komunis.

Dalam demokrasi liberal peran utama dipegang oleh partai politik. Permainan partai politik untuk memenangkan tujuannya menggunakan berbagai cara dan alat, termasuk yang kurang cocok dengan etika dan moralitas. Anggapan banyak orang Indonesia bahwa keadaan demokrasi sekarang sedang *kebablasan*, tidak didukung oleh pakar politik Barat sebagaimana sering kita baca di koran-koran. Buat mereka ini adalah demokrasi yang sedang tumbuh dan tidak boleh diganggu prosesnya sekalipun mungkin terasa aneh serta merugikan kepentingan umum. Namun juga ada pendapat lain dari *Dr. Raj Vasil*, yaitu seorang pakar ilmu politik di Selandia Baru yang mempelajari Asia Tenggara selama 45 tahun terakhir (chaniago dalam <http://www.pangisyarwi.com>). Ia menulis di *Sunday Review* bahwa demokrasi liberal bukan pilihan yang tepat bagi Indonesia. Memang dari dulu para pendiri Republik Indonesia, khususnya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta, selalu memberikan peringatan jangan sampai di Indonesia berlaku demokrasi liberal. Sebab demokrasi liberal hanya menguntungkan pihak yang kuat belaka dan mengabaikan nasib pihak lemah sesuai dengan pandangan liberal *laissez faire, laissez passer*. Selain itu demokrasi liberal tidak mempersoalkan moralitas sebab menjadikan hal itu urusan individual.

Contoh Demokrasi Liberal Dalam Tataran Praksis Terhadap Dinasti Politik Di Daerah

Dalam sebuah catatan situs www.berdikarionline, yang memuat wawancara dengan Alif Kamal, Staff Politik Deputi Partai Rakyat Demokratik yang dimuat tanggal 13 Mei 2013, menyatakan bahwa demokrasi liberal hanya memberikan kebebasan politik kepada rakyat, tetapi tidak ada kebebasan atau demokrasi di lapangan ekonomi. Akibatnya, secara politik negara kita seolah-olah demokratis, tetapi di lapangan ekonomi terjadi kediktatoran oleh segelintir pemilik modal terhadap mayoritas rakyat. Akibat ketidaksetaraan di lapangan ekonomi membawa ekses di kehidupan politik. Lebih lanjut menurut Kamal, kendati semua orang dinyatakan punya hak yang sama untuk memilih dan dipilih, tetapi kenyataannya hanya kaum kaya dan elit-lah yang selalu punya peluang untuk dipilih dan terpilih. Kamal mencontohkan, dalam berbagai ajang pemilu, baik Pemilu nasional maupun Pilkada, selalu saja kelompok pengusaha dan mereka yang punya uang yang bisa maju sebagai kandidat. Akibatnya,

kehidupan politik Indonesia makin didominasi oleh kalangan elit politik tradisional dan pengusaha.

Bila kita cermati maka sistem politik yang lahir kondusif pada demokrasi rakyat karena berbiaya tinggi, sarat dengan politik uang, dan cenderung pro-pasar. Pada awalnya, ketika orang terjun ke politik, modal utamanya adalah gagasan dan program-program perjuangan dan pemberdayaan serta pendampingan suara akar rumput. Namun orientasi sistem politik terbuka saat ini mengubah keterlibatan politik harus diametral dengan kapital finansial, popularitas, dan punya relasi dengan kekuasaan yang kuat. Sehingga masyarakat hanya melihat penguasa yang didominasi oleh sistem politik berbasis patronase atau politik dinasti keluarga. Data berikut menunjukkan tradisi politik yang mengarah pada demokrasi liberal berbasis *patron-client* pada hampir semua partai dan pendirinya.

Tabel 1. Politik Tradisi Keluarga (*patron-client*)

Soekarno	Muhammad Hatta	Soeharto	Gus Dur	Susilo Bambang (SBY)	Amien Rais	Surya Paloh	Sultan HB X
Megawati	Mutia Hatta	Siti Hardiyanti	Yenny Wahid	Agus Harimurti Yudoyono	Hanafi Rais	Ananda Paloh	Sultan HB XI
Guruh Sukarno Putra		Tommy Suharto		Eddy Baskoro			GKR Hemas
Puan Maharani							

Terdapat lima faktor pendorong (katalisator) penyimpangan yang melahirkan budaya patron secara bervariasi:

1. Imbas liberalisasi sistem pemilu,
2. Efek kegagalan partai dalam mengikat konstituen,
3. Implikasi rapuhnya sistem kaderisasi dan perekrutan di internal partai,
4. Akibat kuatnya oligarki di organisasi partai,
5. Serta dampak dari menguatnya pragmatisme politik.

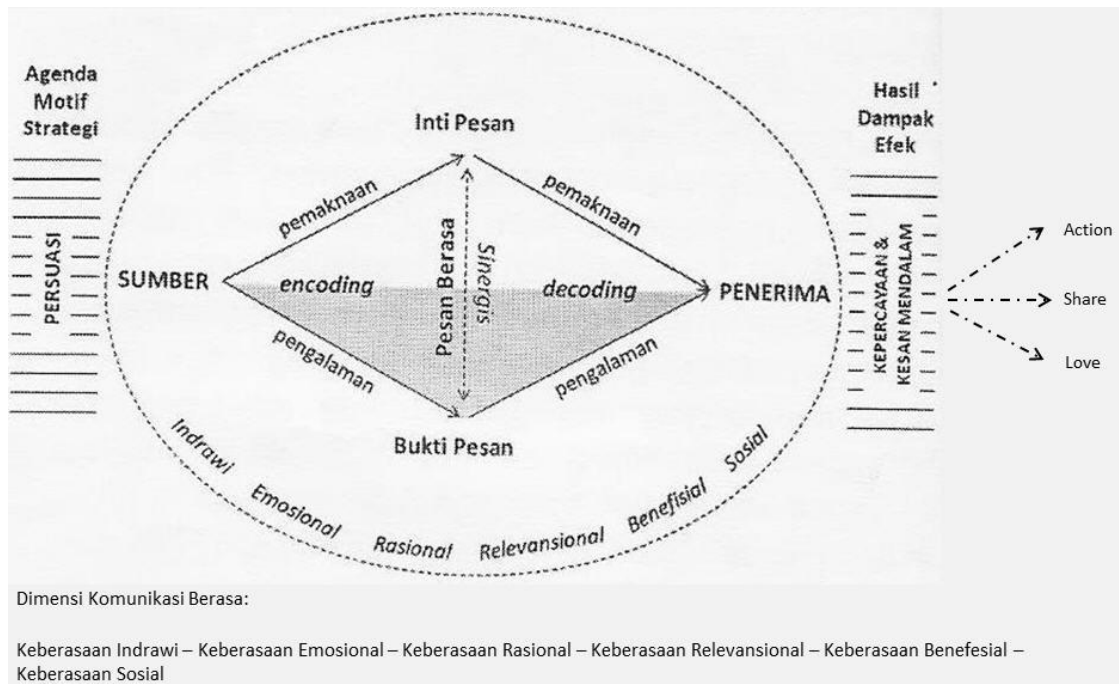
Konstruksi sistem pemilu yang kian liberal menyebabkan partai-partai membutuhkan kandidat calon kepala daerah dan calon legislatif yang populer atau memiliki modal finansial mumpuni. Situasi itu menyebabkan faktor popularitas dan kemampuan finansial calon menjadi paling diprioritaskan. Berikut ini data politik dinasti yang memperkuat tumbuhnya demokrasi liberal, pengutamaan terhadap pasar dan logika kapitalistik, individualisme, dan konsumerisme yang kontra dan bertolak-belakang dengan Demokrasi Pancasila. Semenjak berlakunya otonomi daerah di sejumlah daerah bermunculan dinasti-dinasti politik. Beberapa contoh dinasti politik daerah dapat disebut (data terlampir). Pemilu 2004 dan 2009 serta sejumlah Pemilukada

semenjak 2005 terbukti telah menghasilkan peta pemimpin daerah yang kental pertalian kerabat. Menguatnya pragmatisme politik dan merosotnya militansi kader yang menyebabkan mesin organisasi partai tidak dapat berjalan optimal juga mendorong suburnya politik uang dan politik dinasti. Pendekatan kekuatan uang dan karisma dinasti dijadikan strategi instan untuk menggerakkan mesin organisasi atau pengganti kinerja mesin organisasi dalam pilkada dan pemilu legislatif. Kelima faktor (katalisator) inilah penyebab politik uang dan politik dinasti semakin menggerogoti kelembagaan internal partai dan merusak sendi-sendi demokrasi dan demokratisasi yang sudah berjalan hampir 12 tahun di Indonesia.

Membaca Wajah Budaya Demokrasi di Indonesia dengan Komunikasi Berasa

Setiap detik kita dibombardir miliaran bahkan triliunan pesan politik dan makna politik yang mengalir dari berbagai sumber serta melalui media. Apakah kita mampu menangkap dan mencerna setiap makna pesan yang disampaikan? Apakah yang kita cerna itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan sumber pesan atau pengirim pesan? Apakah pesan-pesan itu menimbulkan kepercayaan bagi kita sebagai khalayak? Pertanyaan ini senada dengan pertanyaan Prof. Dr. H. Soeganda Priyatna, selaku Pakar Komunikasi Politik Universitas Padjajaran yang menyampaikan “Apakah media massa kita ikut membentuk kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi politik saat ini?” yang disampaikan pada kuliah Komunikasi Politik, 9 Oktober 2015 di Universitas Padjadjaran. Lenderman (2006) mencontohkan dalam periklanan, setidaknya terdapat empat ribu pesan yang hadir setiap hari, yang membuat khalayak menjadi *brand atheist*, publik menjadi tumpul terhadap sebuah pesan yang disampaikan. Jawabannya adalah, apa yang di *encode* belum tentu sama dengan yang di-*decode*, terlebih dalam proses *decoding* (teks media). Hal ini dikarenakan terdapat *dominat reader* yang cenderung memonopoli interpretasi makna suatu pesan (Wijaya, 2014). Sejalan dengan pemikiran Shciappa (Hall: 2013), akibatnya pesan pun menjadi tidak berasa. Sesungguhnya pesan yang “meaningless” dan “trustless” terjadi hampir di semua fenomena komunikasi politik saat ini.

Sebagaimana kredibilitas sumber, maka pesan pun akan menjadi kredibel ketika pesan tersebut lebih *meaningful* dan *trustful*. Oleh karena itu, dibutuhkan pesan-pesan politik yang lebih berasa melalui komunikasi berasa. Merujuk pada Wijaya (2014) model komunikasi berasa adalah model komunikasi yang menyinergikan penyampaian dan pembuktian pesan melalui pengalaman khalayak terhadap pesan. Sehingga menimbulkan kepercayaan (*trustworthiness*) dan kesan mendalam (*meaningfulness*) pada pesan tersebut.



Gambar 1. Dimensi Komunikasi Berasa

Sumber: Hasil adaptasi dari Wijaya, 2011abc

Sebuah pesan dalam bentuk apapun verbal atau non verbal atau dalam bentuk program biasanya lahir dari suatu agenda, motif atau strategi tertentu, yang dalam konteks komunikasi persuasi, maka agenda, motif dan strateginya pun bersifat persuasif. Oleh sumber, pesan tersebut kemudian di-*encode* dan dikirimkan langsung ataupun melalui media tertentu, yang kemudian di-*decode* dan diterima oleh penerima pesan. Keberasaan pesan kemudian memberi dampak, efek, maupun hasil komunikasi berupa kepercayaan (*trustworthiness*) dan kesan yang mendalam (*meaningfulness*) terhadap makna pesan yang disampaikan. Melalui proses dialektika ini akan tercipta komunikasi berasa yang dapat menciptakan komitmen dan yang mendorong khalayak melakukan aksi dan tindakan sesuai motif, strategi dan agenda komunikator atau aktor politiknya. Di samping itu, *trustworthiness* dan *meaningfulness* pesan juga dapat mendorong khalayak secara suka rela untuk menyebarkan (*share*) atau berperan aktif mengadvokasi di kalangan audiens dalam jangka panjang. Adapun kritik atas teori ini, seringkali jejaring makna dan pengalaman yang terbangun dalam persepsi khalayak yang sinergis dan massif secara tidak sadar akan melembaga dalam bentuk ideologis, misalnya fanatisme politik yang berlebihan. Situasi tersebut merupakan efek fatal dari proses komunikasi yang terlalu berasa (atau cenderung *meaningfulness*). Hal ini bisa kita lihat ketika seorang kandidat kalah, maka massa pendukungnya terlibat bentrok hanya karena rasa fanatisme yang berlebihan. Potensi *obsesive compulsive* pada sebuah pesan politik hendaknya menjadi potensi konstruktif apabila dikelola dengan sadar, bijak dan santun membaca tujuan politik itu sendiri.

Rekomendasi terhadap pendekatan komunikasi beresasa dalam membaca budaya dan manuver komunikasi politik di tanah air sebagai strategi membangun pengalaman terhadap pesan. Manakala publik sudah pada titik desintisasi atau tumpul dan tidak peka terhadap pesan politik, maka melalui teknik komunikasi beresasa publik diajarkan untuk memaknai keberesasaan sebuah pesan politik dari berbagai dimensi sensorik komunikasi. Diharapkan publik tidak lagi apatis terhadap kondisi politik, apolitik atau bersikap golongan putih (golput) terhadap keputusan politik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sensor keberesasaan yang hendaknya dikembangkan pada publik meliputi: keberesasaan inderawi, keberesasaan emosional, keberesasaan rasional, keberesasaan relevansional, keberesasaan benefisial dan keberesasaan sosial. Semua faktor keberesasaan di masing masing dimensi dapat diolah melalui strategi menetapkan media *eksposure* yang tepat, terpercaya, kredibel sumbernya dan tidak berada pada posisi konflik interest dengan berbagai kepentingan pemiliknya. Saat ini media di tanah air, rata-rata menjadi media peliharaan politisi bukan lagi sebagai anjing penjaga kekuatan keempat demokrasi.

Keberesasaan indrawi, sebuah pesan lebih beresasa kebenarannya ketika disertai bukti ‘fisik’ yang dapat ditangkap melalui pengalaman indrawi khalayak. Dengan demikian pesan tersebut lebih nyata karena buktinya dapat dirasa, diraba, dicitum atau dikecap oleh indra perasa inheren dengan makna yang di-*encode* dalam pesan. Misalnya Politisi atau aktor yang menyampaikan program, hasil nyata program, mengalami langsung program tersebut dapat dirasakan audiens.

Keberesasaan Emosional, melalui pengalaman afektif, khalayak merasakan pesan yang disampaikan lebih nyata dan terbukti kebenarannya. pengalaman afektif disini berarti respon dan evaluasi positif dari perasaan khalayak terhadap pesan dan bukti pesan yang disampaikan. Sehingga pepatah mengatakan mulut bisa berdusta, mata bisa menipu, telinga bisa menyangkal, tapi hati tak bisa berbohong. Karena itu kejujuran nurani yang melibatkan perasaan terdalam dan tersensitif pun menjadi faktor penting dalam komunikasi beresasa. Sensitivitas perasaan dalam memaknai pesan dan mengalami bukti kebenarannya dibutuhkan agar energi dan ‘imajinasi’ empatik dapat bekerja maksimal. Dengan demikian keberesasaan emosional dapat ditilik dari berbagai indikator penting. Seperti: seberapa kuat perasaan khalayak berelasi positif dengan pesan dan bukti pesan yang disampaikan, seberapa positif perasaan khalayak dalam menilai kenyataan bukti pesan; seberapa empatik dan sensitif perasaan khalayak dalam menempatkan diri sebagai komunikator untuk merasakan denyut kesungguhan, kejujuran bahkan kebohongan yang tersirat dalam pesan dan bukti pesan; seberapa dalam rasa percaya dan keyakinan khalayak terhadap makna dan bukti pesan yang disuguhkan. Melalui media khalayak bisa memilih partai yang menempatkan politisi hitam yang terseret dalam pusaran korupsi melalui dimensi relasi positif. Melalui strategi komunikasi ini diharapkan khalayak mampu menjadi agen untuk mengadvokasi jaringan komunikasi disekitarnya dalam menentukan pilihan politiknya.

Keberasaan Rasional, sebuah pesan akan lebih berasa kebenarannya ketika makna pesan tersebut masuk akal. Dengan kata lain apa yang disampaikan dan dibuktikan kebenarannya lebih berasa jika kognisi khalayak mampu menerimanya dengan baik. Dalam hal ini pesan atau makna yang dicangkokkan dalam suatu tindakan komunikatif harus mampu menghargai dan memperhitungkan logika khalayak, karena khalayak tidak pasif. Indikator keberasaan rasional diantaranya seberapa logis atau masuk akal pesan dan bukti pesan yang disampaikan, tanda-tanda awal bukti kebenaran pesan, realisasi janji pesan dan kausalitas prediktif kebenaran pesan.

Keberasaan Relevansional, sebuah pesan sebenar apapun maknanya dan seberapa nyata pun buktinya, akan kurang berasa bagi khalayak jika pesan tersebut tidak relevan dengan kepentingan dan kondisi khalayak. Karena itu, makna dan bukti pesan harus sesuai dengan apa yang khalayak butuhkan, inginkan, harapkan bahkan impikan, sehingga pesan tersebut akan berasa bagi khalayaknya baik secara personal maupun kolektif.

Keberasaan Benefisial, manusia cenderung mengejar keuntungan, manfaat atau benefit untuk mendefinisikan kebahagiaannya (Scott, 2014). Tak heran, dalam teori Uses and Gratification, khalayak cenderung mencari dan merespon konten media yang dianggap menguntungkannya (McQuail, 1992). Komunikasi walaupun bukan panacea, namun sering dianggap sebagai solusi berbagai masalah (Mulyana, 2007). Karena itu, dalam Komunikasi berasa, pesan-pesan yang makna dan buktinya tidak atau kurang memberi manfaat atau kurang solutif akan menjadi kurang berasa bagi khalayak. Meskipun pengalaman indrawi afektif dan kognitif telah berhasil memberikan bukti nyata. Keberasaan *intangible* seperti ketenangan hati, kejelasan dan kepastian masa depan, kebahagiaan, dan berbagai sensor afeksi.

Keberasaan Sosial, ketika bukti pesan dirasakan dan dialami sama oleh khalayak lain, maka keberasaan pesan tersebut semakin kuat. Pemaknaan dan pengalaman pesan dalam proses decoding tidak lagi dimiliki secara eksklusif oleh suatu individu, tapi secara inklusif dan kolektif. Bahkan pemaknaan dan pengalaman yang sama antarsesama komunitas atau khalayak publik ini tidak saja membuat pesan semakin berasa, justru menaikkan derajat kredibilitasnya. Seberapa besar hasrat sosial publik yang dikonstruksi oleh pesan tersebut sehingga memicu penyebarluasan pesan dan testimoninya secara sukarela dikalangan khalayaknya.

Semua dimensi ini memiliki sinergi satu dengan lainnya, untuk menajamkan semua dimensi yang ada tentu melalui proses edukasi bertahap dan pemaknaan yang mendalam terhadap simpul-simpul pesan komunikasi politik yang beredar setiap detik di media massa kita. Publik akan mengalami proses seleksi informasi secara alamiah untuk menentukan informasi yang kredibel bagi pemenuhan kebutuhannya.

Berdasarkan proses mengkaji dan memaknai sejarah perjalanan budaya politik ditengah air, lantas muncul sebuah pertanyaan. Budaya politik dengan bentuk demokrasi apa yang paling

sesuai bagi karakter bangsa ini? Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dan sila ke-4 Pancasila, dirumuskan bahwa “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan”. Dengan demikian berarti demokrasi Pancasila merupakan demokrasi deliberatif.

Dalam demokrasi deliberatif terdapat tiga prinsip utama:

1. prinsip deliberasi, artinya sebelum mengambil keputusan perlu melakukan pertimbangan yang mendalam dengan semua pihak yang terkait.
2. prinsip reasonableness, artinya dalam melakukan pertimbangan bersama hendaknya ada kesediaan untuk memahami pihak lain, dan argumentasi yang dilontarkan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.
3. prinsip kebebasan dan kesetaraan kedudukan, artinya semua pihak yang terkait memiliki peluang yang sama dan memiliki kebebasan dalam menyampaikan pikiran, pertimbangan, dan gagasannya secara terbuka serta kesediaan untuk mendengarkan.

Demokrasi yang deliberatif diperlukan untuk menyatukan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat Indonesia yang heterogen. Jadi setiap kebijakan publik hendaknya lahir dari musyawarah bukan dipaksakan. Deliberasi dilakukan untuk mencapai resolusi atas terjadinya konflik kepentingan. Maka diperlukan suatu proses yang fair demi memperoleh dukungan mayoritas atas sebuah kebijakan publik demi suatu ketertiban sosial dan stabilitas nasional.

SIMPULAN DAN SARAN

Membaca budaya politik di tanah air tidak terlepas membaca sistem politik yang menjadi jiwa dan ideologinya. Paham demokrasi liberal bagi sebagian ahli dan pengamat merupakan konsep ambigu, konsep yang terbuka bagi multi interpretasi. Begitu banyak definisi yang dilekatkan pada obyek demokrasi liberal, sehingga dapat digolongkan sebagai konsep yang secara esensial diperebutkan. Tidak ada pengertian yang netral pada pemahaman demokrasi liberal, karena sejatinya, setiap definisi memiliki ikatan sosial dan politiknya masing-masing dan beroperasi dalam perspektif sosial dan politis tertentu. Di pentas politik Indonesia, demokrasi liberal dianggap kontra produktif dan tidak sejalan dengan nurani demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal adalah wajah politik bagi segelintir kepentingan yang berharap melanggengkan kekuasaan melalui sistem politik. Salah satu contoh yang dikemukakan adalah merebaknya politik tradisi keluarga atau *patron-client* yang terinstitusionalisasi pada tubuh partai politik di Indonesia saat ini. Demokrasi liberal didukung ekspansi ekonomi yang melahirkan sistem oligarki. Yaitu pemusatan kekuatan politik pada segelintir orang yang mengatur arah kekuatan politik suatu negara terlebih dalam pengaturan sumber-sumber kekayaan negara. Jiwa demokrasi Pancasila sekedar jargon, dan mulai ditinggalkan. Hal ini karena masyarakat sudah tumpul dengan terpaan media yang membuat apatis terhadap sistem politik yang ada dari waktu

ke waktu. Sebuah rekomendasi atas budaya politik yang menjiwai karakter bangsa ini, hendaknya berakar dari UUD 1945. Bila secara arif kita gali pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dan sila ke-4 Pancasila, dirumuskan bahwa “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan”. Dengan demikian berarti demokrasi Pancasila merupakan demokrasi deliberatif. Prinsip deliberasi, artinya sebelum mengambil keputusan perlu melakukan pertimbangan yang mendalam dengan semua pihak yang terkait. Prinsip *reasonableness*, artinya dalam melakukan pertimbangan bersama hendaknya ada kesediaan untuk memahami pihak lain, dan argumentasi yang dilontarkan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Perspektif yang secara epistemologis coba dikembangkan dalam pembacaan budaya politik adalah mulai membaca wajah politik dengan pendekatan Model Komunikasi Berasa yang diharapkan mengembalikan cara pandang dan pola pikir khalayak, karena pendidikan politik dimulai dari interpretasi masing-masing individu terhadap pesan media. Publik sudah semakin cerdas dan santun memahami politik, apabila memiliki dimensi *meaningfulness* dan *trustworthiness* pada pemimpin politik yang berkomunikasi melalui media massa.

DAFTAR PUSTAKA

- Cangara, Hafied, 2009, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta: Rajawali Press
- Fukuyama., Francis, 1999. *The End of History and The Last Man* (terjemahan) Amrullah, Yogyakarta: Qalam.
- Hall, S.,J. Evan & S. Nixon, 2013, “Representation”, 2nd Edition, UK: Sage Pub
<http://www.pangisyarwi.com>, diakses pada 15 Oktober 2015, jam 09.00 WIB
- McQuail, Denis, 1992. “Political Communication” dalam Maurice Kogan (ed.) *Encyclopedia of Government and Politics Vol.1*. London: Routledge
- Meadow, Robert G, 1980, *Politics As Communication*, Noorwood, NJ.: ABLEX Publishing Company
- Meadow, Robert G., 1980,” *Politics As Communication*”, Noorwood, NJ.: ABLEX Publishing Company
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy, 2007. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Ricklefs, M.C.M., 1981, “A History of Modern Indonesia: C. 1300 to the Present”, London: McMilan Education ltd.
- Scott, E., 2014, “Secrets of Happy People: Why Happy People Are Better Off”, diakses 15 Oktober 2015, jam 11.00 WIB

Wijaya, B.S.. 2014, Membaca Gaya Komunikasi Pemimpin Kita: Jokowi dan Komunikasi Berasa, Political Communication Institute: Jakarta
www.berdikarionline, diakses pada 15 Oktober 2015, jam 08.00 WIB
www.selasar.com, diakses pada 15 Oktober 2015, jam 12.00 WIB

Lampiran: Data Politik Tradisi berbasis Keluarga yang tersebar di wilayah Indonesia.

- (1) Di Banten, dinasti keluarga Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, yang menguasai jajaran eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi dan seluruh kabupaten di Banten;
- (2) Di Kabupaten Kutai Kartanegara-Kaltim dimana bupati yang sekarang, Rita Widyasari, adalah anak dari bupati sebelumnya yang bermasalah secara hukum. Rita Widyasari berhasil mengalahkan Awang Ferdian Hidayat yang merupakan anak dari Awang Farouk, Gubernur Kaltim saat ini;
- (3) Di Bontang-Kaltim, istri walikota Bontang yang juga menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Neni Moernaeni, maju dalam Pemilukada Bontang 2011;
- (4) Di Lampung, juga disesaki persaingan putra tokoh politik. Rycko Menoza, anak Gubernur Lampung, Sjachroedin, berhasil menjadi Bupati Lampung Selatan. Di Way Kanan, putra bupati setempat, Agung Ilmu Mangkunegara, bersiap meneruskan kekuasaan sang ayah. Anak Bupati Tulang Bawang, Arisandi Dharma Putra, berlaga di Pemilukada kabupaten lain: Pesawaran. Di Kota Bandar Lampung, Heru Sambodo, anak Ketua Golkar Lampung, Alzier Dianis Tabrani, mengincar posisi walikota;
- (5) Di Jambi, terjadi persaingan untuk jabatan gubernur mendatang di antara dua orang keluarga dekat Gubernur Zulkifli Nurdin, yang telah menjabat dua periode, yaitu Hazrin Nurdin, adik gubernur, dan Ratu Munawwaroh, istri gubernur;
- (6) Di Tabanan-Bali, Eka Wiryastuti, anak Bupati Tabanan Adi Wiryatama, bersikeras maju menggantikan kursi bapaknya. Di Lombok Tengah, NTB, pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Juni 2005, melahirkan pasangan mertua-menantu pertama sebagai bupati (Lalu Wiratmaja) dan wakil bupati (Lalu Suprayatno);
- (7) Di Kalimantan Tengah, muncul dinasti keluarga Narang. Pada saat Teras Narang dilantik menjadi Gubernur Kalteng pada Agustus 2005, ketua DPRD kalteng dijabat oleh kakaknya, Atu Narang. Pasca-Pemilu 2009, pamor dinasti politik Narang makin benderang. Atu Narang terpilih kembali sebagai Ketua DPRD Kalteng. Putra sulung Atu, Aris Narang, menjadi anggota DPRD Kalteng dengan suara terbanyak. Adik Aris, Asdy Narang, terpilih jadi anggota DPR-RI;
- (8) Di Sulawesi Selatan, terdapat dinasti keluarga Yasin Limpo. Pensiunan Angkatan Darat ini pernah menjadi Bupati Luwuk, Majene, dan Gowa. Yasin telah pension tapi istri dan anak-

anaknya tetap berkiprah di ranah politik. Pada periode 2004-2009, istri Yasin, Nurhayati, menjadi anggota DPR-RI. Putra pertamanya, Tenri Olle, jadi anggota DPRD Gowa. Tenri bertugas mengawasi adiknya, Ichsan Yasin (putra kelima), selaku Bupati Gowa. Putra kedua, Syahrul Yasin, menjadi Wakil Gubernur Sulsel dan sejak April 2008 naik jadi gubernur setempat;

(9) Di Jawa Tengah, terdapat salah satu keluarga legendaris sebagai pemasok pejabat publik setempat yaitu keluarga pasangan R. Sugito Wiryo Hamidjoyo dan R. Rustiawati. Lima dari 11 putra Sugito meramaikan bursa jabatan publik di Jawa Tengah dan Jawa Barat pada periode 2004-2009. Putra kedua, Don Murdono, jadi Bupati Sumedang sejak 2003 dan terpilih untuk kedua kalinya pada 2008. Adiknya, Hendy Boedoro, menjadi Bupati Kendal sejak tahun 2000 dan terpilih untuk kedua kalinya pada 2005. Karier Hendy tersandung. Sejak Desember 2006, ia ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Si bungsu, Murdoko, juga tak mau kalah. Ia melesat jadi Ketua DPRD Jawa Tengah 2004-2009 dan terpilih untuk kedua kalinya pada 2009. Sang ayah, Sugito, dulu adalah Sekretaris PNI Kendal;

(10) Di Kabupaten Indramayu-Jawa Barat, Bantul-D.I. Yogyakarta dan Kediri-Jawa Timur, di mana bupati sekarang di 3 kabupaten tersebut adalah istri dari bupati sebelumnya; dan masih banyak contoh lainnya di berbagai daerah di Indonesia (Sumber: www.selasar.com, diakses pada 15 Oktober 2015)